

IDENTIFIKASI PERAN POLITIK MUHAMMAD HUSNI THAMRIN TAHUN 1919-1941 SEBAGAI PENGEMBANGAN MATERI SEJARAH INDONESIA KELAS XI SMA

Identifikasi Peran Politik Muhammad Husni Thamrin Tahun 1919-1941 Sebagai Pengembangan Materi Sejarah Indonesiadi Kelas Xi Sma

Octria Dwi Hastuti, Djono*, Isawati

Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sebelas Maret

Abstrak: The purposes of this research are to describe: the background of Muhammad Husni Thamrin's life, political conditions in the Dutch East Indies from 1919-1941, the political roles period 1919-1941, period 1919-1941 as the development of Indonesian history materials for XI grade of high school. This research uses the historical method. The research procedure was carried out through 4 stages of activities namely: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the results of the study it can be concluded: Muhammad Husni is work experience before becoming a member of the board included an internships at the Kematihan office and the Batavia's Karesidenan office, The Political situation of the Dutch East Indies in 1919-1941 divided into 2 periode namely reactionary politics (1918-1930) the last decade of the Dutch East Indies (1930-1942) where national movements were centered on the People's Council and the cooperative party, Political role in 1919-1941 within the Dutch East Indies government was a member of the City Council of Batavia and People's Council. Muhammad Husni Thamrin was also active in parties and other organizations or associations, such as PPPKI, Parindra and GAPI, Political Role of Muhammad Husni Thamrin as the development of Indonesian History materials for XI Grade of High School could be used as a source of material development by Indonesian history teacher in XI grade of KD 3.4 "respecting the values of youth oaths and their meaning for national life in Indonesia today" with the subject matter of the Education and Indonesian National Movement..

Kata Kunci: miskonsepsi, reaksi redoks, reduksi, model REACT

Abstract: The purposes of this research are to describe: the background of Muhammad Husni Thamrin's life, political conditions in the Dutch East Indies from 1919-1941, the political roles period 1919-1941, period 1919-1941 as the development of Indonesian history materials for XI grade of high school. This research uses the historical method. The research procedure was carried out through 4 stages of activities namely: heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the results of the study it can be concluded: Muhammad Husni is work experience before becoming a member of the board included an internships at the Kematihan office and the Batavia's Karesidenan office, The Political situation of the Dutch East Indies in 1919-1941 based on Colonial Political policy, divided into 2 periode namely reactionary politics (1918-1930) the last decade of the Dutch East Indies (1930-1942) where national movements were centered on the People's Council and the cooperative party, Political role in 1919-1941 within

the Dutch East Indies government was a member of the City Council of Batavia and People's Council. Muhammad Husni Thamrin was also active in parties and other organizations or associations, such as PPPKI, Parindra and GAPI, Political Role of Muhammad Husni Thamrin as the development of Indonesian History materials for XI Grade of High School could be used as a source of material development by Indonesian history teacher in XI grade of KD 3.4 "respecting the values of youth oaths and their meaning for national life in Indonesia today" with the subject matter of the Education and Indonesian National Movement.

Keyword: Political Role, Muhammad Husni Thamrin, Development of Indonesian History

PENDAHULUAN

Pembelajaran sejarah memiliki posisi yang cukup penting dalam membangun karakter bangsa. Hal ini dikarenakan pembelajaran sejarah dapat memberikan khasanah yang luas akan pentingnya contoh dan keteladanan, sehingga dapat terbentuk karakter bangsa yang selaras dengan falsafah Pancasila. Pembelajaran sejarah merupakan salah satu mata pelajaran yang dapat mengembangkan karakter bangsa dengan penyampaian materi yang bermakna (Ariska, 2017: 313). Tujuan pendidikan sejarah harus mengandung materi berupa pengetahuan, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik dan nilai (Hassan, 2012: 67).

Upaya untuk membangun karakter bangsa pada peserta didik melalui pembelajaran sejarah, salah satunya dengan mempelajari peran tokoh-tokoh pahlawan bangsa. Nilai-nilai

keteladanan yang terdapat pada tokoh-tokoh pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia perlu dicontoh, terutama oleh generasi muda. Indonesia telah memiliki sejumlah tokoh yang dapat diteladani oleh generasi muda, diantaranya adalah pahlawan-pahlawan bangsa yang muncul pada masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional, telah tampil sekian banyak pemimpin bangsa yang patut mendapat penghargaan tinggi atas jasanya, salah satu diantaranya adalah Muhammad Husni Thamrin.

Muhammad Husni Thamrin adalah seorang politisi era Hindia Belanda yang mengambil jalan kooperatif dalam pergerakannya. Muhammad Husni Thamrin lahir di Batavia pada tanggal 16 Februari 1894 dan meninggal pada 11 Januari 1941. Muhammad Husni Thamrin lahir dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurkhammah. Tabri

Thamrin merupakan seorang wedana. Muhammad Husni Thamrin sebagai anak dari seorang wedana menempuh pendidikan yang cukup baik, diantaranya di *Bijbelschool*, *Instituut Bosch* dan *HBS Koning Willem III* (Ruchiat dkk., 2013: 6-11).

Muhammad Husni Thamrin memiliki pandangan yang terbuka, terutama dalam bidang politik. Muhammad Husni Thamrin sejak awal telah bekerja pada lingkungan pemerintahan, yakni di kantor kepatihan dan karesidenan di Batavia, sampai akhirnya bekerja di Maskapai Pelayaran KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*) (Soedarmanta, 2007: 14). Muhammad Husni Thamrin pada tahun 1919 menjadi anggota dewan di *Gemeenteraad Batavia* (Dewan Kota Batavia). Muhammad Husni Thamrin kemudian mulai masuk di *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada tahun 1927. Pidato Muhammad Husni Thamrin baik di *Gemeenteraad* maupun di *Volksraad*, selalu memaparkan keadaan dan penderitaan rakyat serta ketimpangan sosial dalam masyarakat (Soekanto, 2002: 243). Muhammad Husni Thamrin menuntut agar pemerintah memperbaiki keadaan rakyat (Ruchiat dkk., 2013: 107).

Pengaruh Muhammad Husni Thamrin diluar pemerintahan pun cukup kuat, seperti di PPPKI, GAPI maupun di Parindra.

Muhammad Husni Thamrin sebagai seorang tokoh nasionalis telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, baik dalam lingkup pemerintah maupun diluar lingkup pemerintah. Muhammad Husni Thamrin merupakan salah seorang tokoh pergerakan nasional yang cukup unik. Salah satu keunikannya yaitu jalan kooperatif yang di tempuh dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Muhammad Husni Thamrin memilih berjuang dengan cara kerjasama, karena dengan kerjasamalah maka akan dapat diadakan suatu dialog dengan pemerintah dalam batas pandang politiknya (Suhatno dkk., 1995: 148).

Pada era pembangunan saat ini, cita-cita perjuangan dan pemikiran serta keberanian dari Muhammad Husni Thamrin dapat dijadikan sumber inspirasi dan suri tauladan bagi generasi muda Indonesia. Nilai berani dan patriot yang ada pada Muhammad Husni Thamrin dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia masih sangat relevan diterapkan dalam konteks masa kini.

Sikap patriotik tersebut juga berimplikasi terhadap kesadaran nasional sebagai suatu bangsa. Peran politik Muhammad Husni Thamrin yang diawali ketika menjadi anggota *Gementeraad* Batavia tahun 1919 hingga akhir hayatnya yang masih menjadi anggota *Volksraad* tahun 1941, memiliki nilai historis yang perlu dipahami oleh guru-guru sejarah. Nilai historis ini kemudian dapat diajarkan kepada peserta didik atau generasi muda sebagai pengembangan materi sejarah di sekolah-sekolah untuk menambah penguasaan materi bagi peserta didik.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Sumber data yang digunakan adalah arsip, surat kabar, buku-buku literatur dan sumber lain berupa gambar (Kuntowijoyo, 2003).. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis historis dengan melakukan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber dalam mengolah data sejarah. Prosedur penelitian dilakukan dengan melalui 4

tahap kegiatan yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pemilihan metode historis didasarkan pada peristiwa yang menjadi pokok penelitian yaitu peristiwa dimasa lampau untuk direkonstruksi menjadi cerita sejarah melalui langkah atau metode historis. Metode historis yang dipergunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa pada masa pergerakan nasional yaitu peran politik Muhammad Husni Thamrin Tahun 1919-1941, kemudian merelevansikannya sebagai pengembangan materi pembelajaran sejarah Indonesia di kelas XI SMA.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Kehidupan Muhammad Husni Thamrin

Muhammad Husni Thamrin lahir pada hari Jumat tanggal 16 Februari 1894 dari pasangan Tabri Thamrin dan Nurkhammah. Muhammad Husni Thamrin lahir di rumah orangtuanya di Sawah Besar dengan bantuan dukun beranak yang biasa dipanggil *Nyak Iden*. Muhammad Husni Thamrin di kalangan keluarga dan teman bermainnya biasa dipanggil dengan Matseni (Gonggong, 1992: 6). Muhammad Husni Thamrin

memiliki lima orang saudara kandung, yaitu Muainun, Mohammad Makmun, Sarah, Abdul Fatah dan Mohammad Mansoer. (Rohmadi, 2015: 36).

Keluarga Muhammad Husni Thamrin merupakan keluarga yang terpandang. Ayah Muhammad Husni Thamrin adalah seorang wedana di distrik Batavia. Wedana merupakan sebuah jabatan yang cukup tinggi bagi masyarakat pribumi pada waktu itu (Widyarsono, 2018: 15). Nurkhammah, ibunda dari Muhammad Husni Thamrin, berasal dari keluarga yang taat menjalankan syariat Islam. Nurkhammah yang biasa dipanggil *Mak Nur* atau Nur, dilahirkan di Kampung Ketapang (Ruchiat dkk., 2013: 10).

Muhammad Husni Thamrin sebagai seorang anak wedana menempuh pendidikan yang cukup baik. Muhammad Husni Thamrin mulai memasuki sekolah di *Bijbelschool* Pasar Baru, sekolah dasar swasta eksklusif *Instituut Bos* dan HBS (*Hogere Burger School Koning Willem Drie* (KW III)). Pada tingkat HBS Muhammad Husni Thamrin tidak menyelesaikan pendidikannya (Gonggong, 1992: 8).

Muhammad Husni Thamrin tidaklah pemilih dalam hal pertemanan, meskipun berasal dari keluarga yang terpandang (Gonggong, 1992: 7-8). Setelah meninggalkan bangku sekolah kemudian *magang* di Kantor Kepatihan Batavia dan Kantor Karesidenan Batavia, sampai kemudian pindah ke Perusahaan Pelayaran *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) sebagai *boekhouder* (pemegang buku) (Soedarmanto, 2007: 14). Waktu bekerja di KPM, berkenalan dengan sejumlah penganut politik etis Belanda. Pergaulan dengan sejumlah tokoh politik Etis telah menumbuhkan keyakinan pada untuk memilih jalan kooperatif dengan pemerintah. Melihat peluang bahwa dengan cara kerja sama dengan pemerintah maka akan dapat diadakan suatu dialog dengan pemerintah (Widyarsono, 2018: 94).

Kondisi Politik Hindia Belanda Tahun 1919-1941

Pergerakan nasional semakin lama semakin bersifat radikal, terutama sejak tahun 1921. Hal ini disebabkan karena adanya krisis ekonomi dan pergantian gubernur dari Van Limburg Stirum kepada Mr. D. Fock. Gubernur D. Fock memerintah secara otokratis dan

tidak memperhatikan aspirasi pergerakan nasional.

Tindakan keras dan represif dari pemerintah Hindia Belanda terhadap pergerakan nasional bukannya mematikan semangat para tokoh pergerakan, melainkan memunculkan satu kesadaran baru. Para pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan pada tahun 1926 melaksanakan kongres pemuda I. Setelah berhasil melaksanakan kongres pemuda I, kemudian diadakan kongres pemuda II pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kesadaran akan nasib yang sama dituangkan dalam Sumpah Pemuda yang berintikan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa (Ruchiat dkk., 2013 : 112). Para tokoh pergerakan nasional juga mendirikan partai-partai politik, baik yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif. Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 berhasil mendirikan PNI. Pada tanggal 17 Desember 1927, PNI berhasil menghimpun organisasi-organisasi politik baik yang bersifat kooperatif maupun non-kooperatif untuk membentuk Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) (Ruchiat dkk., 2013: 113).

Terbentuknya PPPKI dan disepakatinya Sumpah Pemuda oleh tokoh pergerakan nasional, membuat pemerintah Hindia Belanda semakin ketat mengawasi para pejuang kemerdekaan. Pemerintah Hindia Belanda semakin gencar melancarkan tuduhan hendak memberontak kepada tokoh pergerakan seperti Soekarno dengan pidatonya yang dianggap radikal. Pada tahun 1934 gubernur jenderal De Jonge yang menggantikan De Graaf menangkap pemimpin pergerakan yang dianggap membahayakan. Tangan besi tersebut sekaligus intimidasi terhadap semua gerakan nasional yang bersifat moderat. De Jonge secara tidak langsung memaksakan sikap kooperatif terhadap gerakan nasional yang ada, sehingga gerakan non-kooperatif tumbang (Muljana, 2008: 231-232). Perjuangan pergerakan dilanjutkan lewat Dewan Rakyat dan organisasi kooperatif lainnya.

Pada tanggal 15 Juli 1936 muncul petisi Soetardjo. Petisi Soetardjo berisi usulan kepada *Volksraad* agar diselenggarakan suatu konferensi kerajaan Belanda dimana dibahas status poli-

tik Hindia Belanda. Setelah dua tahun diajukan, petisi Soetardjo ditolak pada tanggal 14 November 1936 dengan alasan masih belum siapnya rakyat Indonesia untuk berdiri sendiri. Beberapa bulan setelah ditolak petisi Soetardjo maka dibentuklah GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada 21 Mei 1939 yang diprakarsai oleh Muhammad Husni Thamrin untuk menggalang persatuan dan kesatuan (Ruchiat dkk., 2013: 133).

Pada tahun 1940-an situasi perang dunia semakin berkecamuk, sehingga menyebabkan pemerintah Hindia Belanda lebih berhati-hati dalam menghadapi setiap kegiatan politik dengan membentuk (*Politieke inlichtingen Dient*) untuk mengawasi kegiatan politik. PID merupakan alat yang efektif, terutama untuk mengawasi gerak-gerik tokoh-tokoh pergerakan nasional yang dianggap berbahaya. Beberapa tokoh nasionalis mendapat peringatan dari PID jika kegiatan politiknya dianggap mengganggu ketertiban umum bahkan juga penggeledahan-pengeledahan, salah satu diantaranya adalah di rumah pada 6 Januari 1941 (Suhatno, 1995: 145-146).

Peran Politik Muhammad Husni Thamrin Tahun 1919-1941

Muhammad Husni Thamrin mendapatkan kesempatan untuk menjadi anggota *Gemeenteraad* pada tahun 1919. Muhammad Husni Thamrin menerima pencalonan anggota dan berhasil lolos tahap pemilihan. Muhammad Husni Thamrin pada sidang pengangkatan tanggal 27 Oktober 1919 hadir sebagai anggota yang masih cukup muda (Widyarsono, 2018: 22). Muhammad Husni Thamrin sebagai anggota baru dalam *Gemeenteraad* mendukung usul anggota yang dianggap baik.

Perhatian Muhammad Husni Thamrin terhadap keadaan masyarakat di latarbelakangi oleh pengalaman di masa kecilnya, diantaranya adalah usaha penanggulangan banjir di Betawi karena meluapnya Sungai Ciliwung yang dikenal dengan nama proyek “Kanal Ciliwung”. Muhammad Husni Thamrin terus menyampaikan pidato mengenai perbaikan kampung dengan meminta tambahan anggaran dana dalam rangka perbaikan kampung. Selain memperjuangkan perbaikan kampung dalam sidang *Gemeenteraad* juga mengusahakan rumah sewa yang murah bagi penduduk yang kurang mampu. Tanah Muhammad Husni Thamrin di Petojo

dibangun menjadi lapangan sebagai sarana olahraga masyarakat Betawi. Muhammad Husni Thamrin juga memberikan sumbangan uang sebesar f. 209 untuk mendirikan lapangan Petojo (Widyarsono, 2018: 33).

Pada tahun 1930 Muhammad Husni Thamrin diangkat menjadi *Loco Burgemeester II*. Enam bulan kemudian pangkatnya dinaikkan menjadi *Loco Burgemeester I*. Hal ini menunjukkan pengaruh perjuangan politik Muhammad Husni Thamrin yang besar di *Gemeenteraad* (Mona, 1950: 14).

Tahun 1927 ditunjuk sebagai anggota *Volksraad* untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Pada mulanya kedudukan itu ditawarkan kepada HOS Tjokroaminoto, akan tetapi ditolak. Kemudian ditawarkan lagi kepada Dr. Sutomo, tetapi juga menolak. Dibentuklah suatu panitia, yaitu panitia Dr. Sarjito, yang akan memilih seseorang yang dianggap pantas untuk menduduki kursi *Volksraad* yang lowong. Panitia Dr. Sarjito akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Muhammad Husni Thamrin. Alasan yang dikemukakan adalah Muhammad Husni Thamrin

cukup pantas menduduki kursi itu, mengingat pengalamannya sebagai anggota *Gemeenteraad* (Gonggong, 1992: 26-27).

Muhammad Husni Thamrin pada kesempatan pertama berbicara di *Volksraad* menyerukan pentingnya merebut kepercayaan rakyat untuk dapat memperoleh kesetiaan mereka terhadap pemerintah. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda diminta untuk lebih bijak dalam menangani keresahan dan pergolakan yang muncul di masyarakat. Muhammad Husni Thamrin pada pidato kedua dan ketiganya terus mengutarakan pentingnya menjalin hubungan baik dengan rakyat pribumi. Muhammad Husni Thamrin mengangkat isu desentralisasi dan otonomi yang memberikan peran dan kesempatan yang lebih besar bagi rakyat pribumi (Ruchiat dkk., 2013: 109).

Permasalahan yang diangkat dan diperjuangkan Muhammad Husni Thamrin di dalam *Volksraad* diantaranya adalah masalah *koeli ordonantie* akibat diberlakukannya *Poenale Sancitie* (Suharno dkk., 1995: 136-137). Kritik Muhammad Husni Thamrin terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda

tidak berhenti pada masalah *Poenale Sancitie*. Pada tahun 1930, Muhammad Husni Thamrin memberikan reaksinya yang sangat keras terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang melakukan penggeledahan terhadap para pemimpin PNI. Langkah awal yang dilakukan Fraksi Nasional adalah mengadakan pembelaan terhadap tindakan-tindakan penggeledahan terhadap para pemimpin nasionalis “kiri”, terutama PNI. Usaha Muhammad Husni Thamrin berbuah hasil dengan diberikannya pengampunan kepada Soekarno oleh Gubernur Jenderal De Graaf, sehingga pada akhir Desember 1931 Soekarno dibebaskan (Ruchiat dkk., 2013: 116-119).

Langkah penting lain yang dilakukan Fraksi Nasional dalam bidang pendidikan ialah mengadakan oposisi terhadap peraturan pemerintah kolonial yang menyangkut pendidikan, yaitu apa yang dikenal dengan “Ordonansi Sekolah Liar”. Fraksi Nasional meminta untuk ordonansi segera dicabut. Muhammad Husni Thamrin juga mengancam akan mengundurkan diri jika ordonansi tidak segera dicabut (Gonggong, 1992: 37-38). Tindakan menentang ordonansi dilakukan oleh golongan kooperatif dan

non-kooperatif. Tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dari kaum pergerakan tersebut membuat pemerintah mencabut Ordonansi Sekolah Liar pada tanggal 23 Februari 1933 (Suhatno dkk., 1995: 135).

Beberapa kebijakan lainnya yang menjadi sorotan Muhammad Husni Thamrin adalah permasalahan hak tanah, kebijakan penyewaan tanah rakyat kepada perkebunan industri dan kebijakan pasar dalam produk konsumsi yang terkait langsung dengan kehidupan rakyat sehari-hari, kebijakan impor, serta usaha penggabungan *Gemeente Batavia* dengan *Gemeente Meeste Cornelis* (Ruchiat dkk., 2013 : 122-123). Muhammad Husni Thamrin juga mengajukan usul untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di sidang *Volksraad*. Usul tersebut disetujui dan sejak tahun 1939 bahasa Indonesia duduk sejajar dengan bahasa Belanda, sebagai bahasa resmi yang digunakan di *Volksraad* (Ruchiat dkk., 2013: 135).

Muhammad Husni Thamrin selain menjadi anggota *Gemeenteraad* dan *Volksraad*, juga aktif dalam partai dan organisasi atau perhimpunan lainnya, seperti PPPKI, Parindra dan

GAPI. Muhammad Husni Thamrin di dalam PPPKI menjabat sebagai bendahara, sekaligus menjadi bendahara Fonds Nasional. Fonds Nasional adalah suatu badan yang dibentuk pada tanggal 29 Desember 1929 dalam kongres ke-II PPPKI di Surakarta. Tujuannya adalah untuk menghimpun dana bagi keperluan nasional (Widyarsono, 2018: 66). Muhammad Husni Thamrin selain menjadi bendahara yaitu menjadi pengurus harian PPPKI bersama dengan Otto Iskandardinata menggantikan Dr. Sutomo dan Mr. Latuhary (Pringgodigdo, 1991: 160). Muhammad Husni Thamrin juga aktif di dalam salah satu partai yaitu Parindra.

Parindra singkatan dari Partai Indonesia Raya, merupakan sebuah partai yang bertujuan untuk kebebasan dan kebesaran Indonesia. Parindra didirikan pada tanggal 24 Desember 1935 oleh Dr Soetomo, sebagai perpaduan partai politik PBI (Persatuan Bangsa Indonesia) dan BO (Boedi Oetomo) (Majalah Bangoen, 1937). Sejak Parindra berdiri, Muhammad Husni Thamrin menjadi anggotanya. Nama Muhammad Husni Thamrin dalam Parindra semakin terkenal. Muhammad Husni Thamrin

kemudian diangkat menjadi Ketua Departemen Politik (Suhatno dkk., 1995:115-116).

Muhammad Husni Thamrin dalam kongres Parindra yang kedua di Bandung tanggal 23 sampai 26 Desember 1938 tampil sebagai pembicara. Dalam laporan G.F Pijper (penasehat urusan dalam negeri) tanggal 10 Februari 1939 kepada gubernur jenderal bahwa kongres berjalan lancar tanpa gangguan. (ANRI, 1939).

Pada 21 Mei 1939, Muhammad Husni Thamrin memprakarsai berdirinya Gabungan Politik Indonesia (GAPI). Tujuan pembentukan GAPI adalah mempersatukan partai politik di Indonesia menuju tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Anggota GAPI adalah Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, PSII dan PII (Suhatno dkk., 1995: 117) .

Pada tanggal 2 Juli 1939, GAPI mengadakan konferensi pertama yang menghasilkan “Aksi Indonesia Berparlemen”. GAPI juga menuntut terbentuknya parlemen yang demokratis dan pemerintah harus bertanggungjawab pada parlemen tersebut. Setelah hal itu dipenuhi, barulah GAPI akan mengajak

seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung Pemerintah Belanda dalam melawan musuhnya. Pada tanggal 13-15 Desember 1939, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia di Batavia. Pada kongres ini ditetapkan Sang Merah Putih sebagai bendera persatuan dan lagu “Indonesia Raya” sebagai lagu persatuan rakyat Indonesia. Kongres ini juga berusaha meningkatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (Ruchiat dkk., 2013: 134-135).

Pada tahun 1940-an situasi internasional memanas akibat perang, pemerintah Hindia Belanda semakin berhati-hati dalam menghadapi setiap kegiatan politik. Segala pertemuan dan kegiatan lainnya yang melibatkan massa tidak lepas dari pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda membentuk alat pengawasan yang paling efektif bagi pemerintah, yaitu P.I.D (*Politieke Inlichtingen Dienst*). Muhamamd Husni Thamrin telah dua kali mendapat peringatan dari PID (Widyarsono, 2018: 79-80).

Pada hari Senin pagi 6 Januari 1941 rumah Muhammd Husni Thamrin di Jalan Sawah Besar 32 digeledah.

Muhammad Husni Tahmrin sedang terbaring sakit demam dan muntah-muntah. Muhammad Husni Thamrin terbangun ketika petugas PID menggeledah rumahnya. Muhammad Husni Thamrin mencoba untuk memprotes penggeledahan tersebut, akan tetapi tidak diindahkan. Rumah Muhammad Husni Thamrin sejak saat itu dijaga ketat oleh PID dan tidak seorangpun diizinkan untuk keluar rumah. Demikian pula anak Muhammad Husni Thamrin, Deetje Zubaida juga tidak diperkenankan meninggalkan rumahnya, sekalipun untuk pergi ke sekolah. Surat-surat yang ditemukan di rumah Muhammad Husni Thamrin yang berisi kritik tajam terhadap Pemerintah Hindia Belanda digunakan RGAZ Levelt sebagai alasan penahanan rumah terhadap Muhammad Husni Thamrin yang tidak loyal pada pemerintah (Gonggong, 1992: 165).

Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 1941 Muhammad Husni Thamrin menghembuskan nafas terakhir sebelum ulang tahunnya yang ke 47 tahun. Keesokan harinya, pada hari Minggu 12 Januari 1941 Muhammad Husni Thamrin dimakamkan (Suhatno dkk., 1995: 150).

Peran Politik Muhammad Husni Thamrin (1919-1941) Sebagai Pengembangan Materi Sejarah Indonesia

Muhammad Husni Thamrin merupakan politisi era Hindia Belanda yang muncul setelah mendapat pendidikan Barat dalam tingkatan yang tertinggi. Muhammad Husni Thamrin merupakan tokoh pergerakan nasional yang memilih untuk mengambil jalan kooperatif. Muhammad Husni Thamrin bersedia bekerja didalam institusi pemerintah kolonial dan menggunakan kedudukan tersebut sebagai alat perjuangannya. Muhammad Husni Thamrin adalah seorang tokoh pergerakan nasional yang sangat berani. Baik didalam *Gementeraad* maupun *Volksraad*, Muhammad Husni Thamrin selalu memparakan kepincangan yang terjadi di dalam masyarakat. Muhammad Husni Thamrin selalu menuntut perbaikan dari pemerintah Hindia Belanda dalam sidang-sidang yang dihadapinya. Muhammad Husni Thamrin mengharapkan kehidupan yang baik untuk rakyat Indonesia.

Peran politik Muhammad Husni Thamrin yang diawali ketika menjadi anggota *Gementeraad* Batavia tahun

1919 hingga akhir hayatnya yang masih menjadi anggota *Volksraad* tahun 1941, memiliki nilai historis yang perlu dipahami oleh guru-guru sejarah. Nilai historis ini dapat diajarkan kepada peserta didik atau generasi muda sebagai pengembangan materi sejarah disekolah-sekolah untuk menambah penguasaan materi bagi peserta didik. Pada materi sejarah Indonesia kelas XI SMA, peran politik Muhammad Husni Thamrin pada tahun 1919-1941 belum diuraikan secara rinci pada materi pokok pelajaran sejarah "Pendidikan dan Pergerakan Nasional Indonesia". Peran Politik Muhammad Husni Thamrin Tahun 1919-1941 dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan materi oleh guru pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas XI dengan direlevansikan dalam kompetensi 3 pada KD 3.4 "*menghargai nilai-nilai sumpah pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini*" dengan materi pokok Pendidikan dan Pergerakan Nasional Indonesia.

SIMPULAN

Latar belakang kehidupan Muhammad Husni Thamrin dipengaruhi oleh keluarga, pendidikan yang ditempuh, lingkungan masyarakat dan sosialisasi

politik. Menempuh pendidikan yang cukup baik, diantaranya di sekolah kanak-kanak *Bijbelschool* Pasar Baru, sekolah dasar *Institut Bos* dan *HBS Konink Willem III School*. Sejak awal telah bekerja di lingkungan pemerintah, diantaranya di kantor kepatihan dan karresidenan Batavia, Keadaan politik Hindia Belanda pada tahun 1919-1941 terutama dalam organisasi atau perhimpunan pergerakan nasional mengalami perkembangan walaupun tidak stabil. Hal ini ditandai dengan gerakan yang sudah terorganisir yang bersifat nasional dengan tujuan Indonesia merdeka, seperti terbentuknya PPPKI, Fraksi Nasional, GAPI dan disepakatinya Sumpah Pemuda oleh tokoh pergerakan nasional. Berkembangnya pergerakan nasional membuat pemerintah Hindia Belanda semakin ketat mengawasi para pejuang kemerdekaan dengan membentuk PID (*Politieke inlichtingen Dient*) untuk mengawasi kegiatan politik tokoh pergerakan nasional. Peran politik dari tahun

1919-1941 diantaranya adalah menjadi anggota *Gemeenteraad Batavia*, *Volksraad*, PPPKI, Parindra dan GAPI. Selalu memparkan kepincangan baik didalam *Gementeraad* maupun *Volksraad*, yang terjadi didalam masyarakat dan menuntut perbaikan dari pemerintah Hindia Belanda. Muhammad Husni Thamrin selain aktif di lingkungan pemerintah juga aktif di partai dan organisasi atau perhimpunan lainnya, seperti di PPPKI, Parindra dan GAPI. Relevansi peran politik Muhammad Husni Thamrin tahun 1919-1941 dalam materi sejarah Indonesia yaitu sebagai bahan pengembangan materi pelajaran sejarah Indonesia kelas XI dengan direlevansikan dalam kompetensi 3 pada KD 3.4 “*menghargai nilai-nilai sumpah pemuda dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di Indonesia pada masa kini*” dengan materi pokok Pendidikan dan Pergerakan Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, J. B. D., dkk (1996). *Nasionalisme di Berbagai Daerah*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Sanata Dharma
Bandung: Rizqi Press.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

- Daryanto & Dwicahyono, A. (2014). *Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, PHB, Bahan Ajar)*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Gonggong, A. (1992). *Pahlawan Nasional Muhammad Husni Thamrin*. Jakarta : Balai Pustaka
- Gottschalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia
- Hasan. (2012). *Pendidikan Sejarah Indonesia: Isu dalam Ide dan Pembelajaran*.
- Heri, S. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah : isu, gagasan dan strategi pembelajaran*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Kartono, Kartini. (1976). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta : Gramedia
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Kurniawan, D. (2014). *Peranaan Volksraad Dalam Perkembangan Pendidikan Politik Masyarakat Pribumi Di Hindia Belanda Tahun 1916-1942*. Universitas Sebelas Maret. Skripsi diperoleh pada tanggal 27 Maret 2019, dari digilib.uns.ac.id
- Mohammad, S., Kulap, M., & Hamdiyah, L. M. (2018). *Historical Education in the Process of Nation Character Building of Indonesia*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Volume 5, Issue 5 hal 312-316.
- Mona, M. (1950). *Riwayat Penghidupan dan Perjuangan M. Husni Thamrin*. Medan: Pustaka Gemilang
- Mujiarti, S. (2006). *Pengaruh Petisi Soetardjo 15 Juli 1936 Terhadap Pergerakan Nasional Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. Skripsi diperoleh pada tanggal 19 Februari 2019, dari digilib.uns.ac.id
- Muljana, S. (2008). *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Notosusanto, N. (1971). *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta : Debdikbud
- Poeponegoro, M. D. & Notosusanto, N. (1984). *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: PN Balai Pustaka
- Pringgodigdo, A.K. (1991). *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat
- Priyadi, S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta : Ombak
- Rabani., dkk. (2015). *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya
- Ranjabar, J. (2016). *Pengantar Ilmu Politik, dari Ilmu Politik Sampai Politik di Era Globalisasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Rochmat, S. (2009). *Ilmu Sejarah Dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu

- Rohmadi, N. (2015). *Peran Mohammad Husni Thamrin Dalam Volksraad (1927-1941)*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rohmadi, N., Akhyar, M., & Warto. (2018). *Motion Thamrin: Language Politics and Inlander (Indigenous) Appellation for Indonesian People*. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Volume 5, Issue 1, hal77-83.
- Ruchiat, R., dkk. (2013). *Sepak Terjang Perjuangan Politik Muhammad Husni Thamrin*. Jakarta: UP Museum Joang 45
- SA, Soekanto. (1989). *Matahari Jakarta: Lukian Kehidupan M. Husni Thamrin*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Setiadi, E. M & Kolip, U. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sinaryatin, T. A. (2017). *Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sejarah*. Jurnal SAP Vol. 1 No. 3.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Soedarmanto, J.B. (2007). *Jejak-Jejak Pahlawan Perikat Persatuan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Soekanto, S. (2002). *Sosilogi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Persada
- Sudrajat, E., dkk (1998). *Regionalisme, Nasionalisme dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Suhatno, dkk. (1995). *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan: Haji Agus Salim dan Muhammad Husni Thamrin*. Jakarta: Depdikbud
- Susilo, A. (2018). *Politik Etis dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia*. Jurnal Historia Volume 6, Nomor 2.
- Widyarsono, T. (2018). *Cahaya Di Batavia: M. H. Thamrin Dan Gerakan Nasionalis Kooperasi di Indonesia 1927-1941*. Yogyakarta: Penerbit Diandra
- Yatim, B. (1999). *Soekarno, Islam Dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu